

DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

SAKIP

SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2020

VISI : TERWUJUDNYA PERMUKIMAN YANG LAYAK BERKELANJUTAN, DAN TATA KELOLA PERTANAHAN YANG AKUNTABEL



DAFTAR ISI

Daftar Isi	2
Kata Pengantar.....	3
Ringkasan Eksekutif	4
Bab I Pendahuluan	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Maksud dan Tujuan.....	6
C. Tugas dan Fungsi.....	6
D. Struktur Organisasi.....	6
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	11
A. Pengukuran Kinerja	11
B. Analisis Kinerja.....	11
C. Realisasi Anggaran	38
D. Analisis Efisiensi	39
Bab IV Penutup	41



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr Wb



Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018. Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu tahun 2020 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu pada umumnya.

Bengkalis, February 2020



KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS

GENDRAYA ROHAINI, ST., M. Si
Pembina Tk.I

NIP. 19780508 200604 1 007



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas Perumahan dan Penataan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dimana selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 diantaranya:

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020 ,Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis terdapat **3 (Tiga) sasaran** dan terdapat **6 (Enam) indikator** untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2020.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan hasil kerja sama segenap jajaran serta bimbingan dari pimpinan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk tahun 2020, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance dan clean governance*.



BAB 1 PENDAHULUAN





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah.

Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2020. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

1. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
2. Perumusan dan penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
4. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kepada semua instansi pemerintah dan pihak yang terkait dibidang perumahan, permukiman dan pertanahan;
5. Pelaporan pelaksanaan tugas meliputi pelaporan kinerja dan keuangan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eseloning, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:



1. Kepala;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Seksi Perumahan;
 - b. Seksi Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Pendataan, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU), terdiri dari:
 - a. Seksi Prasarana dan Sarana Jalan;
 - b. Seksi Pertamanan; dan
 - c. Seksi Sanitasi, Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Pendukung.
5. Bidang Pertanahan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan dan Pengadaan Tanah;
 - b. Seksi Pemetaan dan Survei; dan
 - c. Seksi Penatagunaan Tanah.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.



BAB 2 PERENCANAAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Tahun 2020.

A. Rencana Strategis Tahun 2017 -2021

Sasaran	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	12%	15%	20%	25%	30%
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0046%	0,0046%	0,0046%	0,0046%	0,0046%
	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	20%	40%	60%	80%	100%
	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	10%	25%	50%	75%	100%
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	CC	B	B	B	BB

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	25%
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0046%
	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100%
Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	80%
	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	75%
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B

An aerial photograph of a coastal area. In the foreground, a large, white, Y-shaped structure extends into the water. A small boat is docked at the end of the structure. In the background, there is a building with a red roof on a small island or peninsula, surrounded by greenery and a paved area with a circular driveway. The water is a light brown color.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis merupakan bentuk pertanggung-jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan tahun 2020. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	25%	5,16	20,65
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,0046%	0,0018	38,45
	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100%	100%	100%
Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	80%	3,93	4,91
	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	75%	0	0
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari **3 (tiga) sasaran** dan **6 (enam) indikator** tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:



SASARAN 1 :
Meningkatnya Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
(PSU) Permukiman

Tabel. 3.2
Indikator Capaian Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung
Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 Thp 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana utilitas umum (PSU)	65,95	25	5,16	20,65	68,82
Rata-rata capaian				20,65	68,82

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa prasarana, sarana, dan utilitas umum menjadi salah satu aspek yang menentukan suatu perumahan layak huni atau tidak.

Lingkup perumahan dapat dilihat dari jenis pelayanan dasar perumahan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu:

1. Rumah layak huni dan terjangkau; serta
2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Berdasarkan Permenpera Nomor 22 Tahun 2008 tersebut, Lingkungan Perumahan adalah lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas.

Sesuai Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, dalam Pasal 3 ayat (4), tercantum bahwa indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU).

Pengertian PSU merujuk pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 ini disebutkan pengertian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), sebagai berikut:

Pasal 1 angka 21 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu



untuk kebutuhan bertempat tinggal layak, sehat, aman, dan nyaman, paling sedikit terdiri dari jalan, drainase, sanitasi dan jaringan air minum.

Pasal 1 angka 22 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, paling sedikit terdiri dari rumah ibadah, dan ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 1 angka 23 dan Penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf b:

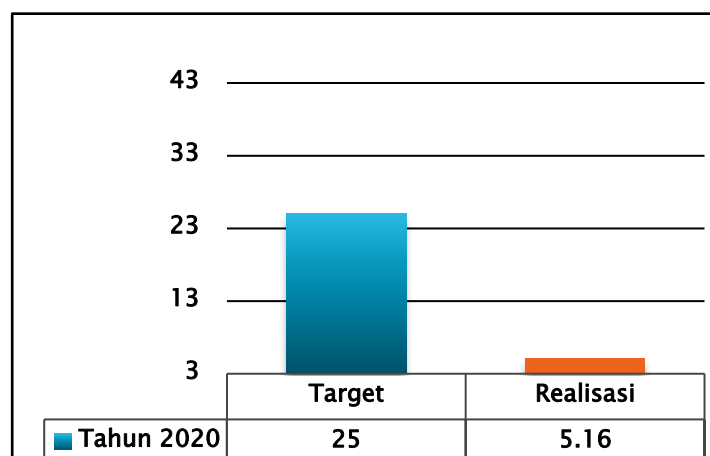
Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian, paling sedikit terdiri dari jaringan listrik termasuk KWH meter, dan jaringan telepon.

Indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Kabupaten Bengkalis dapat dilihat berupa pembangunan: **Prasarana Terdiri Atas:** Cakupan Jalan Lingkungan, Drainase Sekunder, Sanitasi Komunal, Persampahan (TPS), Jaringan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan. **Sarana terdiri atas:** Cakupan Rumah Ibadah Komunitas dan **Utilitas Umum terdiri atas:** Cakupan Listrik Pemerintah/PLN dan Jaringan Nirkabel.

Cakupan lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) dapat dianalisis melalui jumlah lingkungan yang didukung PSU yang terdiri dari jumlah Desa/Kelurahan pada 11 Kecamatan di Kabupaten Bengkalis.

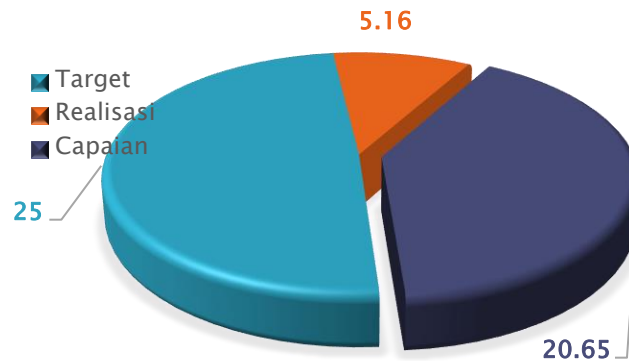
Merujuk Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2011, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Tupoksinya memfokuskan pada cakupan pada pelaksanaan penyediaan Prasarana jalan (Jalan Lingkungan), Prasarana Drainase (Drainase Tersier), Prasarana Sanitasi (Sanitasi Komunal dan Perumahan).

Grafik.3.1
Skor Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Tahun 2020





Grafik.3.2
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman
(Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas umum (PSU))



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan terhadap cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang akan dilaksanakan secara efektif
- Persentase yang terealisasi sesuai dengan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU
- Persentase capaian cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU Tahun 2020

Berdasarkan pemaparan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) diatas, untuk mengetahui jumlah lingkungan (Kelurahan/Desa) yang didukung PSU kurun waktu tertentu dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel.3.3
Rekapitulasi Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah Kelurahan/Desa yang Didukung PSU	Keterangan
1.	Bengkalis	31	4	
2.	Bantan	23	3	
3.	Siak Kecil	17		
4.	Bukit Batu	10		
5.	Bandar Laksamana	7		
6.	Rupat	16		
7.	Rupat Utara	8		
8.	Mandau	11	1	
9.	Bathin Solapan	13		
10.	Pinggir	10		
11.	Talang Muandau	9		
JUMLAH		155	8	

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Tahun 2020 terpenuhi dan berfungsi dengan baik pada Desa dan Kelurahan berjumlah: **8 Kelurahan/Desa**.



Tabel.3.4
Identifikasi Urusan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)

Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)														
Prasarana							Sarana			Utilitas Umum				
Jalan	Drainase		Sanitasi		Jaringan Air Minum		RTH		Rumah Ibadah	Listrik		Jaringan Telepon		
Jalan Lingkungan	Drainase Sekunder	Drainase Tersier	Sanitasi Komunal	Sanitasi Perumahan	Persampahan (TPS)	Air Minum Perkotaan	Air Minum Perdesaan	Permukiman/Lingkungan	RTH Bangunan	Rumah Ibadah Komunitas	Listrik Pemerintah/PLN	Listrik Swadaya	Kabel	Nirkabel/BTS

Ket: Sumber Data : Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU Tahun 2020 (diolah).

Gambar 3.1
Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)
Kabupaten Bengkalis





Tabel.3.5
Rekapitulasi Realisasi Urusan Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)										
	Prasarana						Sarana		Utilitas Umum		
	Jalan			Drainase			Sanitasi		RTH		
	Jalan Lingkungan			Drainase Tersier			Sanitasi Komunal	Sanitasi Perumahan	Permukiman/Lingku ngan		Listrik
	Ukuran/Measurement										
	M'			M'			KK	SR	M	M ²	M'
	Badan Jalan	Penimbunan (Base)	Burda	Beton	Hotmix	Parit Lingkungan	Komunal (5-10 KK & >50 KK)	Individu	Pedestrian /Trotoar	Taman	PJU
1.	0	2.322	1.642,80	17.705,01	1.857,84	2.322	100	50	175	196	37.274

Ket: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 (diolah).





Berdasarkan tabel 3.5 diatas, Tahun Anggaran 2020 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah merealisasikan pembangunan dan Peningkatan antara lain:

- Prasarana jalan yakni pembangunan jalan lingkungan kawasan permukiman terealisasi sepanjang: **23.527,65 M** (23,5 Km) terdiri atas pekerjaan peningkatan dan pembangunan: badan jalan, penimbunan (base), burda, beton dan hotmix di Kabupaten Bengkalis.
- Prasarana drainase yakni drainase tersier pembangunan dan peningkatan (parit/selokan kawasan perumahan dan lingkungan) pada Tahun 2020 di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Rupal dan Mandau terealisasi sepanjang **2.322 M** (2,32 Km).
- Prasarana sanitasi yakni sanitasi komunal terealisasi **100 Kepala Keluarga (KK)** berupa pembangunan tangki septik tank skala individual perdesaan minimal 50 KK bersumberkan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat terealisasi di 2 (dua) Desa antara lain: Desa Senggoro dan Kelapapati Kecamatan Bengkalis dengan penerima manfaat masing-masing 250 jiwa, sehingga sanitasi komunal di Kecamatan Bengkalis tercover 500 Jiwa penerima manfaat.
- Prasarana sanitasi yakni sanitasi Perumahan terdiri atas pembangunan septik tank dan sambungan rumah (SR) jaringan pipa terealisasi antara lain pembangunan tanki septik skala individual 50 Unit dan sambungan rumah jaringan 50 sambungan ke rumah-rumah di Kecamatan Bengkalis.
- Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) yakni RTH permukiman/lingkungan terdiri atas pembangunan pedestrian/trotoar pada Kecamatan Bengkalis terealisasi: **175 Meter** (0,175 Km) dan pembangunan taman di Kecamatan Pinggir seluas: **196 M²**
- Utilitas Umum yakni Listrik berupa pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) pada Kecamatan Bengkalis, Bantan, Siak Kecil, Rupal, Rupal Utara, Mandau dan Pinggir Tahun Anggaran 2020 terealisasi/terbangun sepanjang: **37.274 M¹** (37,2 Km).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

PSU merupakan satu kesatuan yang memiliki andil penting (vital) bagi meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman di Kabupaten Bengkalis yang mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, selain itu keseriusan Pemerintah Daerah dalam memenuhi hajat hidup masyarakat dalam mengejar ketertinggalan penyediaan infrastruktur khususnya pada kawasan permukiman harus mendapat apresiasi penuh serta dukungan dari berbagai pihak (*stockholder*) dan masyarakat, ditambah ketersediaan alokasi anggaran yang mencukupi dan SDM aparatur pemerintah merupakan nilai tambah dalam mewujudkan program dan kegiatan strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan/Hambatan

Ketersediaan data jalan melalui Surat Keputusan (SK) dan integrasi perencanaan antara OPD terkait (Dinas PUPR) dan Pihak Desa, khususnya penyediaan infrastruktur permukiman



jalan lingkungan harus segera dilaksanakan, hal tersebut menghindari *overlapping* perencanaan pembangunan, selain itu perlu dipertegas batas wewenang OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi, sehingga peran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dapat lebih optimal.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

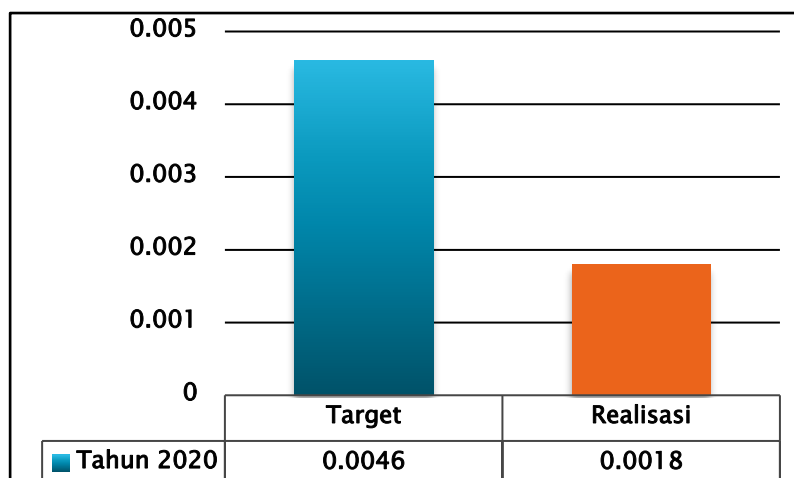
Perlu dilakukan pemerataan desa/kelurahan yang terpenuhi cakupan layanan PSU dengan melihat skala prioritas khususnya pada wilayah yang strategis dan memiliki dampak langsung dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya dibutuhkan kerja keras Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam merangkul OPD terkait khususnya menghindari *overlapping* (tumpang tindih) penataan kawasan permukiman yang tercakup dalam PSU serta meneliti kembali wilayah yang menjadi sasaran pembangunan PSU di Kabupaten Bengkalis.

Tabel. 3.6
Indikator Capaian Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh
Tahun 2020

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Lingkungan permukiman kumuh	43,30	0,0046	0,0018	38,45	0,012
Rata-rata capaian				38,45	0,012

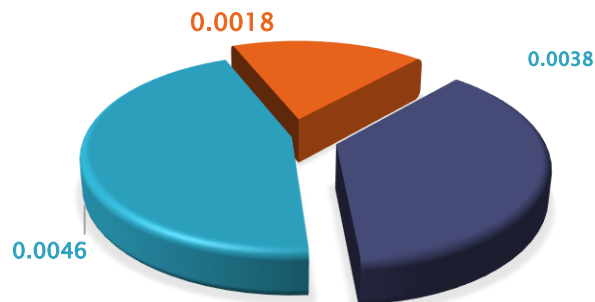
Berdasarkan tabel diatas: Meningkatnya Kualitas Permukiman yang Tertata target yang ditetapkan Tahun 2020 sebesar: 0,0046% terealisasi: **0,0018% atau 38,45%** sehingga secara umum adanya pengurangan luas kawasan permukiman kumuh yang ditarget oleh Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2020.

Grafik.3.3
Skor Capaian Lingkungan Permukiman Kumuh Tahun 2020





Grafik.3.4
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman
(Lingkungan Permukiman Kumuh)



Capaian Kinerja

- Persentase rencana terhadap lingkungan permukiman kumuh yang akan dilaksanakan secara efektif
- Persentase yang terealisasi sesuai dengan lingkungan permukiman kumuh
- Persentase capaian lingkungan permukiman kumuh Tahun 2020

Berangkat dari Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 : *"Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"* Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman: *"Penanganan permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang"* dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lampiran huruf D No. 2 dan 3 tentang pembagian urusan *"Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 ha pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kabupaten/Kota"*

Penataan lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor: 341/KPTS/X/2014 pada 12 kawasan permukiman kumuh dengan luas wilayah penetapan seluas: **180,34 H (1,8033 Km²)** namun seiring berjalannya waktu Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupten Bengkalis Melaksanakan kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Tahun 2016, dari hasil studi, terdapat 2 (dua) kelurahan pada SK tidak termasuk dalam usulan revisi SK yaitu Kelurahan Balik Alam dan Kelurahan Batang Serosa.

Sedangkan kedua kelurahan tersebut mendapat dana bantuan pemerintah pusat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pemerintah Pusat. Sehingga pada Tahun Anggaran 2019 dimana hasil revisi RP2KPKP Tahun 2019, belum didukung basis data (baseline) R0 terakhir, sehingga ditarik kesimpulan adanya perbedaan luas deliniasi kawasan permukiman kumuh antara SK dengan hasil pendataan (baseline) KOTAKU Tahun 2015 dan pendataan Tahun 2020 dan penghitungan dan pengurangan kawasan permukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hanya memperhitungkan capaian pengurangan kawasan permukiman kumuh di lokasi yang mendapat program KOTAKU yaitu Kelurahan Duri Barat, Balik Alam dan Batang Serosa Kecamatan Mandau.



Tabel. 3.7
Rekapitulasi Hasil Pendataan (Baseline) RO Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Mandau

No.	Nama Kawasan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)	Capaian Penanganan (Tahun)					Sisa Luasan Permukiman Kumuh (ha)
				2017	2018	2019	2020	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kws Perkotaan Duri-Duri Barat	Duri Barat	12,46	0,76	4,23	2,76	4,71	12,46	0
2	Kws Perkotaan Duri-Balik Alam	Balik Alam	10,66	0,50	4,26	0,25	1,31	6,32	4,34
3	Kws Perkotaan Duri-Batang Serosa	Batang Serosa	8,85	2,10	0	6,75	0	8,85	0
Jumlah			31,97	3,36	8,49	3,01	12,77	27,63	4,34

Sumber Data : Ekspose Rakor Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 (diolah).

Tabel. 3.8
Rekapitulasi Hasil Pendataan (Baseline) RO Replikasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Bengkalis

No.	Nama Kawasan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)	Capaian Penanganan Tahun 2020	Sisa Luasan Permukiman Kumuh (ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kws Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong	Damon	5,21	0	5,21	Telah ditangani terjadi penurunan tingkat kekumuhan dari kumuh berat menjadi kumuh ringan
2	Kws Perkotaan Bengkalis-Kelapapati	Kelapapati	4,30	4,30	0	
3	Kws Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Rimba Sekampung	24,95	11,95	13,00	
Jumlah			34,46	16,25	18,21	

Sumber Data : Ekspose Rakor Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 (diolah).



Tabel. 3.9
Rekapitulasi Luas Kawasan Permukiman Kumuh dan Capaian Pengurangan Kawasan Kumuh
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No.	Nama Kawasan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (ha)					Capaian Pengurangan Kumuh (Tahun)					Sisa Luasan Kumuh
				SK Bupati Bengkalis No.314/KP TS/X/2014	RP2KPK Tahun 2016	RP2KPK Tahun 2019	Baseline Tahun 2015	Baseline Tahun 2020	2017	2018	2019	2020	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kws Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong	Bengkalis	Damon	6,95	22,65	22,65	n/a	5,21	0	0	0	0	0	5,21
2	Kws Perkotaan Bengkalis-Kelapapati	Bengkalis	Kelapapati (Desa)	9,52			n/a	4,30	0	0	0	4,3	4,3	0,00
3	Kws Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Bengkalis	Rimba Sekampung	11,23	21,52	21,52	n/a	24,95	0	0	0	11,95	11,95	13,00
4	Kws Perkotaan Duri-Duri Barat	Mandau	Duri Barat	7,11	15,27	0	12,46	n/a	0,76	4,23	2,76	4,71	12,46	0,00
5	Kws Perkotaan Duri-Balik Alam	Mandau	Balik Alam	17,11	n/a	10,94	10,66	n/a	0,5	4,26	0,25	1,32	6,32	4,34
6	Kws Perkotaan Duri-Batang Serosa	Mandau	Batang Serosa	13,11	n/a	11,01	8,85	n/a	2,1	0	6,75	0	8,85	0,00
7	Pinggir	Pinggir	Pinggir (Desa)	4,22	4,22	4,22	n/a	n/a	0	0	0	0	0	4,22
8	Pantai Indah Selat Baru	Bantan	Selat Baru	17,79	17,55	71,33	n/a	30,67	0	0	0	0	0	17,79
9	Sekitar Pasar Sungai Pakning	Bukit Batu	Sungai Pakning	27,09	17,88	17,88	n/a	n/a	0	0	0	0	0	27,09
10	Pasar Baru Lubuk Muda	Siak Kecil	Lubuk Muda	29,68	20,08	31,86	n/a	n/a	0	0	0	0	0	29,68
11	Batu Panjang	Rupat	Batu Panjang	24,71	23,71	24,71	n/a	76,95	0	0	0	0	0	24,71
12	Permukiman Nelayan Tanjung Medang	Rupat Utara	Tanjung Medang	11,81	11,81	11,81	n/a	211,00	0	0	0	0	0	11,81
Jumlah				180,33	154,69	205,28	31,97	353,08	3,36	8,49	9,76	22,27	43,88	137,85

Sumber Data : Ekspose Rakor Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 (diolah).



Tabel. 3.10
Rekapitulasi Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Pendataan Baseline Tahun 2020

No.	Nama Kawasan	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah RT	Kekumuhan	
						Nilai	Tingkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kws Perkotaan Bengkalis-Parit Bangkong	Bengkalis	Damon	5,21	5	18	Kumuh Ringan
2	Kws Perkotaan Bengkalis-Cik Mas Ayu	Bengkalis	Rimba Sekampung	13,00	4	18	Kumuh Ringan
3	Pantai Indah Selat Baru	Bantan	Selat Baru	30,67	6	34	Kumuh Ringan
4	Batu Panjang	Rupat	Batu Panjang	76,95	6	25	Kumuh Ringan
5	Permukiman Nelayan Tanjung Medang	Rupat Utara	Tanjung Medang	211,00	8	25	Kumuh Ringan
6	Kws Perkotaan Duri-Duri Barat	Mandau	Duri Barat	6,95	3	24	Kumuh Ringan
7	Kws Perkotaan Duri-Balik Alam	Mandau	Balik Alam	4,34	3	16	Kumuh Ringan
8	Kws Perkotaan Duri-Talang Mandi	Mandau	Talang Mandi	15,29	10	23	Kumuh Ringan
9	Kws Perkotaan Duri-Pematang Pudu	Mandau	Pematang Pudu	26,25	8	31	Kumuh Ringan
10	Kws Perkotaan Duri-Air Jamban	Mandau	Air Jamban	47,24	27	19	Kumuh Ringan
11	Kws Perkotaan Duri-Duri Timur	Mandau	Duri Timur	10,29	5	18	Kumuh Ringan
12	Kws Perkotaan Duri-Gajah Sakti	Mandau	Gajah Sakti	39,15	12	20	Kumuh Ringan
13	Kws Perkotaan Duri-Harapan Baru	Mandau	Harapan Baru	36,00	5	32	Kumuh Ringan
14	Sebangar	Bathin Solapan	Sebangar	17,29	13	24	Kumuh Ringan
15	Balai Makam	Bathin Solapan	Balai Makam	17,57	13	24	Kumuh Ringan
16	Petani	Bathin Solapan	Balai Makam	35,32	8	30	Kumuh Ringan
17	Bumbung	Bathin Solapan	Petani	18,63	6	28	Kumuh Ringan
18	Kesumbo Ampai	Bathin Solapan	Bumubung	38,95	4	31	Kumuh Ringan
Jumlah				670,95	146		

Sumber Data : Ekspose Rakor Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 (diolah).



Tabel. 3.11
Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diusulkan Untuk Ditetapkan Dalam Keputusan Bupati Bengkalis

Kawasan dan Kecamatan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Pendataan Baseline Tahun 2020 (ha)	Luas Kawasan Kumuh yang Belum dilakukan Pendataan Baseline (ha)	Jumlah (2) + (3)
(1)	(2)	(3)	(4)
22 Kawasan dan 9 Kecamatan	670,95	53,96	724.91

Sumber Data : Ekspose Rakor Pokja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 (diolah).

Berdasarkan Tabel 3.11, Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang diusulkan Untuk Ditetapkan Dalam Keputusan Bupati Bengkalis terdiri atas **22 Kawasan dan 9 Kecamatan** dengan luas kawasan permukiman kumuh berdasarkan pendataan baseline Tahun 2020 seluas: **670,95 ha** dan luas kawasan kumuh yang belum dilakukan pendataan baseline (ha) seluas: **53,96 ha**. Total luas kawasan kumuh yang diusulkan untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati seluas: **724,91 Ha**.

Berdasarkan tabel diatas, luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan seluas: **180,33 H (1.8033 Km²)** berdasarkan Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/X/2014, namun adanya revisi penetapan kawasan kumuh basis data (baseline) R0 menjadi: **353,28 H (3.5328 Km²)** sehingga secara bertahap dilaksanakan penataan sehingga berkurang/sisa penanganan kawasan kumuh seluas: **137,85 Ha (0,13785 Km²)** melalui penataan bersumberkan Anggaran APBD Kabupaten Bengkalis atau program Pemerintah Pusat Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Dukungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui APBD Tahun 2020 pada revisi Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) 2019, sehingga adanya penetapan baseline Tahun 2020 terhadap penetapan pengurangan kawasan permukiman kumuh Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan/Hambatan

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terhadap penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- Belum adanya dukungan basis data (baseline) R0 pada Surat Keputusan (SK) Bupati Bengkalis Nomor 341/KPTS/X/2014;
- Hasil dari Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Tahun 2016, terdapat 2 (dua) kelurahan pada SK tidak termasuk dalam usulan revisi SK yaitu Kelurahan Balik Alam dan Kelurahan Batang Serosa, sedangkan kedua kelurahan tersebut mendapat dana bantuan pemerintah pusat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pemerintah Pusat;



- Hasil dari revisi RP2KPKP Tahun 2019, belum didukung basis data (baseline) RO terakhir;
- Adanya perbedaan luas deliniasi kawasan permukiman kumuh antara SK dengan hasil pendataan (baseline) KOTAKU Tahun 2015 dan pendataan Tahun 2020;
- Adapun penghitungan dan pengurangan kawasan permukiman dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 hanya memperhitungkan capaian pengurangan kawasan permukiman kumuh di lokasi yang mendapat program KOTAKU yaitu Kelurahan Duri Barat, Balik Alam dan Batang Serosa Kecamatan Mandau.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

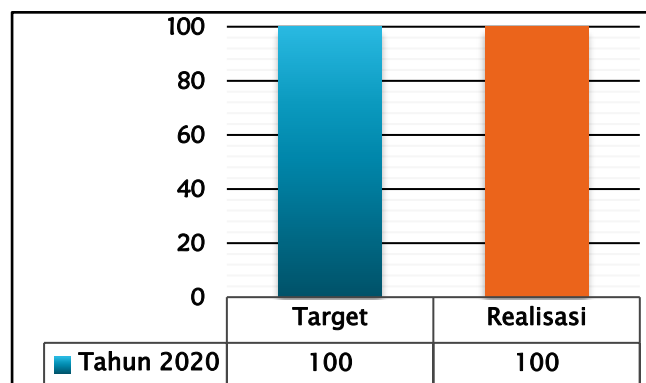
Berdasarkan hasil analisis terhadap revisi penetapan kawasan permukiman kumuh perlu dilakukan usulan luas kawasan permukiman kumuh untuk ditetapkan dalam keputusan Bupati Bengkalis terhadap Luas Kawasan Permukiman Kumuh Berdasarkan Pendataan Baseline Tahun 2020 (ha) ditambah Luas Kawasan Kumuh yang Belum dilakukan Pendataan Baseline (ha) kedepan.

Tabel. 3.12
Indikator Capaian Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun
Tahun 2020

Indikator	2019	2020		Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	
Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100	100	100	100
Rata-rata capaian				100

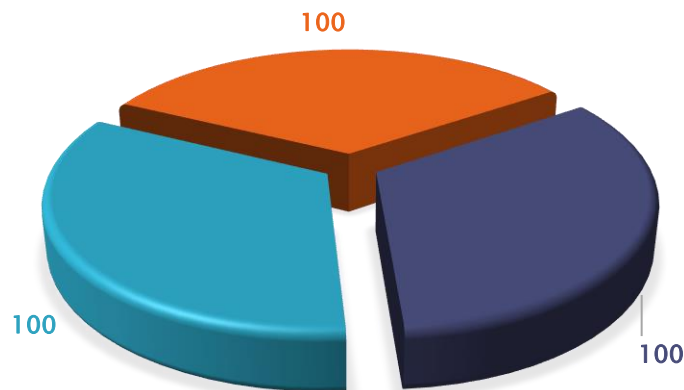
Berdasarkan tabel 3.12 diatas, target Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun yang ditetapkan Tahun 2020 sebesar: 100% terealisasi: 100% atau 100% dari target capaian yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis.

Grafik.3.5
Skor Capaian Persentase Rumah Layak Huni yang
Dibangun Tahun 2020





Grafik.3.7
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman
(Persentase Rumah Layak Huni yang Dibangun)



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan rumah layak huni yang dibangun yang akan dilaksanakan secara efektif
- Persentase yang terealisasi terhadap rumah layak huni yang dibangun di Kabupaten Bengkalis
- Persentase rumah layak huni yang dibangun Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Rumah Layak Huni (RLH) dibangun Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bersumber alokasi APBD pada rentang Tahun 2017 s.d 2020 berjumlah: **1000 Unit**, sedangkan RLH bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 berjumlah: **521 Unit**.

Pembangunan RLH yang bersumberkan pada APBD T.A 2020 direncanakan dibangun berjumlah **600 Unit**, tidak dapat dilaksanakan dikarenakan *recofusing* anggaran untuk alokasi COVID-19 sehingga dapat dipastikan dilaksanakan rasionalisasi. Namun demikian untuk pembangunan RLH bersumberkan dari APBD Provinsi Riau Tahun 2020 terealisasi berjumlah **17 Unit RLH** yang tersebar antara lain di Desa Bantan Tengah terbangun: **4 Unit RLH**, Desa Bantan Air terbangun: **3 Unit RLH**, Desa Selat Baru terbangun: **3 Unit RLH**, Kelurahan Balai Raja terbangun: **4 Unit RLH** dan Kelurahan Gajah Sakti terbangun: **3 Unit RLH** dengan alokasi anggaran pembangunan RLH berjumlah Rp.60.000.000,-/Unit.

Gambar 3.1 Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU)
Rumah Layak Huni Kabupaten Bengkalis



Selain Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada Tahun Anggaran 2020 memfasilitasi kegiatan bantuan



peningkatan kualitas rumah secara swadaya dengan berupa bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya pada Desa Air Putih Kecamatan Bengkalis berjumlah: **72 Unit**, Desa Hutan Panjang berjumlah: **56 Unit** dan Desa Pangkalan Nyirih berjumlah: **62 Unit**, masing-masing desa mendapat bantuan **Rp. 17.500.000/Unit Rumah**, sehingga jumlah keseluruhan penerima manfaat pada 3 Desa berjumlah: **190 Unit Rumah**.

Tabel. 3.13
Daftar Rekapitulasi Penerima Rumah Layak Huni Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2020

N A M A		ALAMAT	KEC	KEL/DESA	UNIT	HARGA SATUAN
1. DESA BANTAN TENGAH						
1	Lalan	Jl. Gajah Mada RT 001/003	Bantan	Desa Bantan Tengah	1	60,000,000
2	Mai	Jl. Gajah Mada RT 002/003	Bantan	Desa Bantan Tengah	1	60,000,000
3	War	Jl. Gajah Mada RT 005/005	Bantan	Desa Bantan Tengah	1	60,000,000
4	Agi	Jl. Gajah Mada RT 005/006	Bantan	Desa Bantan Tengah	1	60,000,000
Jumlah					4	240,000,000
2. DESA BANTAN AIR						
1	Marzuki	Jl. Mergo Utomo	Bantan	Desa Bantan Air	1	60,000,000
2	Zainal	Jl. Hasbullah	Bantan	Desa Bantan Air	1	60,000,000
3	Wahyudi	Jl. H. Sarmin	Bantan	Desa Bantan Air	1	60,000,000
Jumlah					3	180,000,000
3. KEL. BALAI RAJA						
1	Erni Erimayanti	Jl. Subrantas RT.003 RW 009	Pinggir	Kel. Balai Raja	1	60,000,000
2	Nurma	Jl. Melasak RT.002 RW.004	Pinggir	Kel. Balai Raja	1	60,000,000
3	Sugini	Jl. Kampung Teladan RT.002 RW 006	Pinggir	Kel. Balai Raja	1	60,000,000
4	Siswoyo	Jl. Bengkalis-Jeruk RT.002 RW 007	Pinggir	Kel. Balai Raja	1	60,000,000
Jumlah					4	240,000,000
4. DESA SELAT BARU						
1	Herman	Jl. Nelayan Dusun Pantai Indah RT 001 / 013	Bantan	Desa Selat Baru	1	60,000,000
2	Dahrul	Gg. Subur Dusun Pantai Indah RT 002 / 013	Bantan	Desa Selat Baru	1	60,000,000
3	Kasiaten	Jl. Antara Dusun Penanar Laur RT 002 / 002	Bantan	Desa Selat Baru	1	60,000,000
Jumlah					3	80,000,000
5. KEL. GAJAH SAKTI						
1	Tugina	Kel. Gajah Sakti	Mandau	Kel. Gajah Sakti	1	60,000,000
2	Welinar	Kel. Gajah Sakti	Mandau	Kel. Gajah Sakti	1	60,000,000
3	Sularno	Kel. Gajah Sakti	Mandau	Kel. Gajah Sakti	1	60,000,000
Jumlah					3	180,000,000
5 (Lima Desa & Kelurahan)					17	1,020,000,000.

Ket: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2020 (diolah).



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pembangunan RLH Kabupaten Bengkalis merupakan amanah UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, dimana landasan utama adalah konstitusi yang telah diamanahkan negara dalam kebijakan strategis pemerintah/presiden. Sedangkan tersedianya alokasi anggaran setiap tahunnya baik dari APBD Kabupaten Bengkalis dan Provinsi Riau didalam pelaksanaan pembangunan RLH guna mendukung program penyediaan RLH bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki andil yang sangat penting ditambah kebijakan *Sharing* anggaran dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan RLH dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi adalah bentuk komitmen nyata dan berkesinambungan guna mendukung kegiatan dan mengisi kekurangan alokasi pembangunan RLH oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Permasalahan/Hambatan

Secara kuantitas unit RLH yang dialokasikan mengacu dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan jumlah calon penerima RLH se-Kabupaten Bengkalis belum dapat terpenuhi dengan optimal, hal tersebut dikarenakan proporsi didalam alokasi anggaran pada APBD Kab. Bengkalis khususnya pada urusan pelayanan dasar tidak hanya infrastruktur namun non infrastruktur harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan fisik daerah. Permasalahan lain yakni mekanisme transfer keuangan dari Pemerintah Pusat melalui alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga menjadi hambatan didalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan RLH dan *recofusing* anggaran akibat pandemi COVID-19 menjadi hambatan tersendiri didalam merealisasikan pembangunan RLH Kabupaten Bengkalis.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Perlu dilaksanakan proses seleksi yang ketat mengenai calon penerima RLH oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, sehingga diharapkan masyarakat yang tepat sasaran dan berhak sesuai kriteria yang akan mendapatkan bantuan pembangunan RLH. Selain itu perencanaan yang matang khususnya dalam pengalokasian anggaran pembangunan RLH harus digesa khususnya pada awal tahun anggaran dan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan sampai proses penyerahan unit RLH pada masyarakat, sehingga pengalaman secara administrasi dan teknis pembangunan RLH pada T.A 2019 menjadi bahan evaluasi dan koreksi bagi meningkatkan pelaksanaan tahun depan.

Selain pembangunan RLH, kegiatan pendukung kegiatan bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya dengan berupa bantuan peningkatan kualitas rumah sangat membantu melengkapi pembangunan RLH.



SASARAN 2 :
Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah

Tabel. 3.14
Indikator Capaian Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Tahun 2020

Indikator	2019	2020			Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Persentase luas lahan bersertifikat	36,97	80	3,93	4,91	4,91
Rata-rata capaian				4,91	4,91

Berdasarkan tabel 3.14 pada Sasaran 2 diatas meningkatnya kepemilikan tanah pemerintah dengan indikator persentase luas lahan bersertifikat yang ditetapkan pada Tahun 2020 dengan target yang akan dilaksanakan sebesar: 80% terealisasi: 3,93% atau 4,91% yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu melalui Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkulu. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu dalam melaksanakan fungsi identifikasi, pemetaan permasalahan, proses pendataan, merekapitulasi serta merangkumkannya dalam data pemerintah yaitu lahan yang bersertifikat yang merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu melalui OPD yang berwenang didalam pelaksanaan pendataan aset lahan bersertifikat, secara konsisten melakukan pendataan dan realisasi sertifikasi lahan yang merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu. Untuk dapat melihat pelaksanaan inventarisasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.15 sebagai berikut:



Tabel. 3.15
Inventarisasi Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
Per-Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Inventarisasi Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis				Jumlah Luas Tanah (Hektar) (4-7)	Ket
		Jumlah Belum Bersertifikat (Persil)	Luas Tanah Belum Bersertifikat (Ha)	Jumlah Sudah Bersertifikat (Persil)	Luas Tanah Sudah Bersertifikat (Ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bengkalis	64	26.708	9	3.74	22.97	
2.	Bantan	42	24.621	9	3.52	21.10	
3.	Siak Kecil	29	88.091	-	-	-	
4.	Bukit Batu	-	-	-	-	-	
5.	Bandar Laksamana	-	-	-	-	-	
6.	Rupat	-	-	-	-	-	
7.	Rupat Utara	-	-	-	-	-	
8.	Mandau	56	29.603	-	-	-	
9.	Bathin Solapan	-	-	-	-	-	
10.	Pinggir	24	16.119	-	-	-	
11.	Talang Muandau	-	-	-	-	-	
Jumlah		215	185.14	18	7.27	44.06	

Ket: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2020 (diolah).

Tabel. 3.16
Inventarisasi Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis
Provinsi Lainnya Tahun 2020

No	Kecamatan	Inventarisasi Lahan/Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis				Jumlah Luas Tanah (Hektar) (4-7)	Ket
		Jumlah Belum Bersertifikat (Persil)	Luas Tanah Belum Bersertifikat (Ha)	Jumlah Sudah Bersertifikat (Persil)	Luas Tanah Sudah Bersertifikat (Ha)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	DIY Jogjakarta (Kab. Sleman)	0	0.0168	1	0.0168	-	
2.	Jawa Barat (Kec. Bogor Barat)	1	0.10	-	-	-	
Jumlah		1	0.12	1	0.02		

Ket: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2020 (diolah).

Luas Tanah Pemda yang belum bersertifikat : 185,26 (216 Persil)

Luas Tanah Pemda yang sudah bersertifikat : 7.28 (19 Persil)



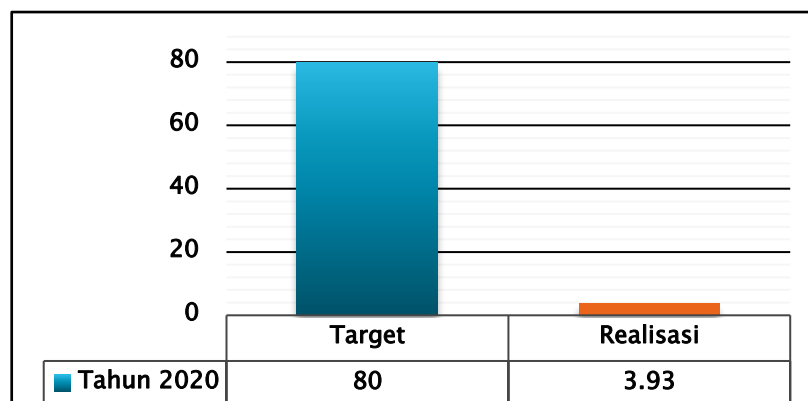
Tabel. 3.17
Realisasi Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

No	Desa/Kel	Peruntukan Tanah	Luas	Luas Tanah (Ha)	Lokasi Tanah	Asal/Usul	Tahun	Kondisi
		Tanah	Tanah	Tanah	Tanah	Perolehan	Perolehan	Tanah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Desa Air Putih	Tanah Pemakaman Umum (TPU)	Sertifikat Hak Milik No.45 Tgl 12/4/1995 a.n Siti Zauyanti Yoana	0,000137	Jl. Pramuka Kec. Bengkalis	Ganti Rugi	2014	Tanah Kosong Untuk TPU
			Sertifikat Hak Milik No. 6 Tgl 22/6/1991 a.n Yohanto	0,000345	Jl. Pramuka Kec. Bengkalis			
2	Desa Pedekik	Tanah Pembangunan Sarana dan Prasarana IKK Kabupaten Bengkalis	Sertifikat Hak Milik No. 1158 Tgl. 7 April 1982 a.n Sulung Ramli	0,00017		Ganti Rugi	2019	
JUMLAH				0,000652				

Ket: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2020 (diolah).

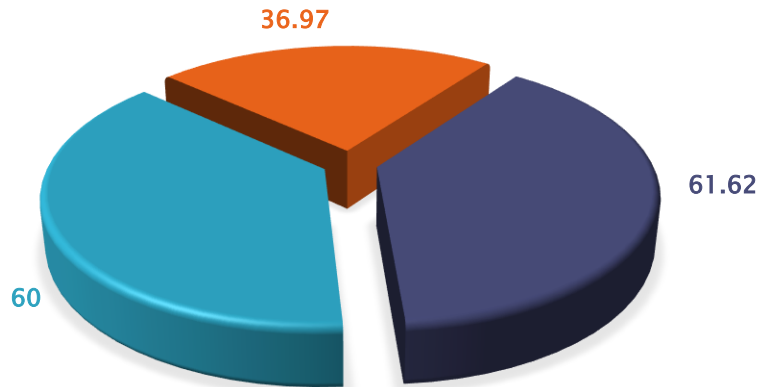
Berdasarkan Tabel 3.17 diatas, pendataan aset tanah milik pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dilaksanakan di 2 (dua) Desa di Kecamatan Bengkalis antara lain Desa Air Putih dan Desa Pedekik dengan jumlah luas sertifikasi 0,000652 Ha (6,520 M²).

Grafik.3.8
Skor Capaian Persentase Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2020





Grafik.3.9
Capaian Kinerja Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah
(Persentase Luas Lahan Bersertifikat)



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan terhadap persentase luas lahan pemda yang bersertifikat secara efektif
- Persentase yang terealisasi terhadap luas lahan pemda yang bersertifikat di Kabupaten Bengkalis
- Persentase capaian luas lahan pemda yang bersertifikat Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendata asset Pemerintah berupa penerbitan sertifikat tanah melalui pendanaan secara komprehensif adalah langkah konkrit didalam menertibkan asset dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis juga konsen terhadap asset tanah pada Provinsi lainnya melalui pendataan secara bertahap, sehingga kedepan sertifikasi berjalan sesuai dengan target dan capaian yang diharapkan.

Permasalahan/Hambatan

Luasnya wilayah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas 11 Kecamatan merupakan tantangan tersendiri didalam pelaksanaan kegiatan serta minimnya ketersediaan SDM yang berpengalaman didalam bidang pertanahan ditambah dengan beban kerja yang kompleks menjadi tantangan tersendiri pada Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

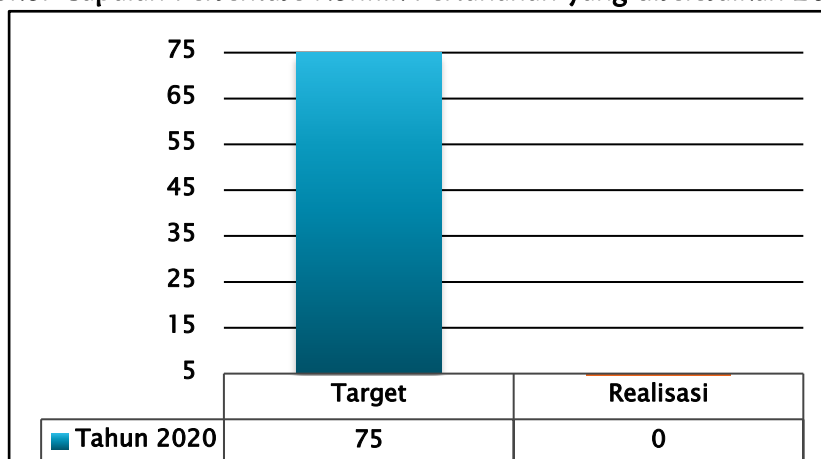
Perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap, sehingga pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan dengan lancar, selain itu dibutuhkan kerja keras khususnya pada SDM yang tersedia baik secara kuantitatif maupun kualitatif.



Tabel. 3.18
Indikator Capaian Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan
Tahun 2020

Indikator	2019	2020			Capaian 2019 Terhadap 2021 (%)
	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Persentase Konflik Pertanahan yang Diselesaikan	0	75	0	0	0
Rata-rata capaian				0	0

Grafik.3.10
Skor Capaian Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan 2020



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dalam penyelesaian konflik pertanahan melalui ketersediaan dana tanggap terhadap langkah konkrit dan ketersediaan anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh besar terhadap keberhasilan program dan kegiatan. Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu juga konsen terhadap mediasi antara pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu dan langkah preventif terjadinya konflik yang berhubungan dengan pertanahan.

Permasalahan/Hambatan

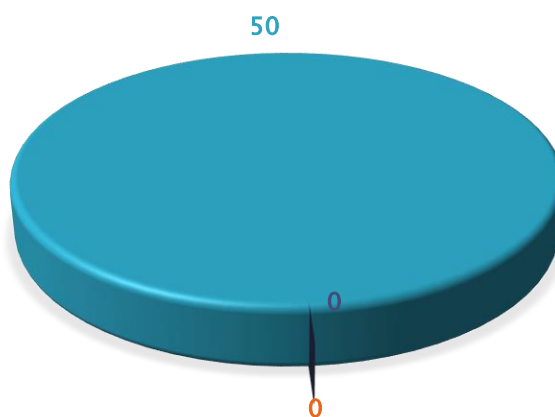
Luasnya wilayah aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu yang terdiri atas 11 Kecamatan merupakan tantangan tersendiri didalam pelaksanaan kegiatan serta minimnya ketersediaan SDM, serta proses hukum didalam penyelesaian konflik butuh koordinasi dan waktu yang lama didalam menuntaskan konflik Kabupaten Bengkulu melalui OPD teknis Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah



Perlu dilakukan langkah konkrit dengan pelaksanaan kegiatan secara bertahap, sehingga pelaksanaan mediasi, proses pemantauan kondisi lapangan dan langkah preventif yang harus diambil.

Grafik.3.11
Capaian Kinerja Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah
(Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan)



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan terhadap persentase konflik pertanahan yang diselesaikan
- Persentase terealisasi terhadap konflik pertanahan yang diselesaikan di Kabupaten Bengkalis
- Persentase capaian konflik pertanahan yang diselesaikan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

SASARAN 3 :
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Tabel. 3.19
Indikator Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Tahun 2020

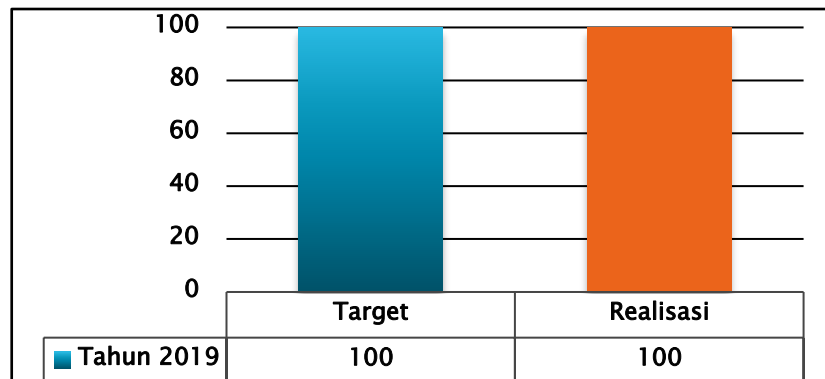
Indikator	2018	2019		Capaian 2019 Terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	
Predikat Akuntabilitas Kinerja	B	B	100	100
Rata-rata capaian				100

Berdasarkan tabel sasaran 3: Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yang ditetapkan Tahun 2019 pada indikator: Nilai Akuntabilitas Kinerja ditarget nilai B (61,32) terealisasi nilai B atau Nilai B dan Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan target **B** terealisasi **B** atau **B** jauh diatas ekspetasi target capaian yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis.

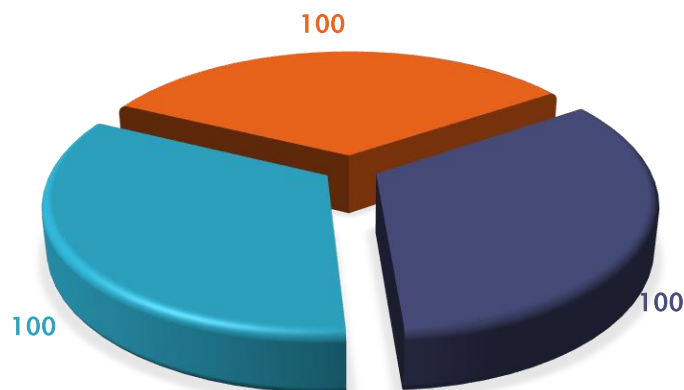
Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam mencapai penilaian Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Penyelesaian Persentase Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan yang ditanggapi oleh Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis.



Grafik.3.12
Skor Capaian Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
Tahun 2020



Grafik.3.13
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja
(Predikat Akuntabilitas Kinerja)



Capaian Kinerja

- Persentase yang direncanakan terhadap prediket akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara efektif
- Persentase yang terealisasi terhadap prediket akuntabilitas kinerja pada OPD
- Persentase capaian tindaklanjut hasil prediket akuntabilitas kinerja OPD Tahun 2019

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Keseriusan dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan capaian Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk memantapkan laporan yang akuntabel dengan melibatkan seluruh *stockholder* yang dalam ini OPD startegis urusan wajib dan pelayanan sehingga mendukung kinerja Pemerintah Daerah serta tranparansi dalam memenuhi seluruh tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan.

Permasalahan/Hambatan

Keterbatasan SDM dan dinamisasi organisasi menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan serius oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dimana keberlanjutan didalam mempersiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja membutuhkan SDM yang cakap dan kredibel, selain itu hambatan didalam tundaklanjut hasil pemeriksaan keuangan membutuhkan langkah



yang preventif didalam melaksanakan penyerapan anggaran, pengawasan dan sosialisasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Perlu dilakukan langkah konkrit berupa kesiapan SDM dan aparatur kredibel didalam melaksanakan transparansi akuntabilitas kinerja melalui laporan yang akurat, efisien dan tepat sasaran didalam menggambarkan akuntabilitas capaian realisasi capaian program dan kegiatan, selain itu dibutuhkan langkah preventif didalam mempertahankan segala tindaklanjuti hasil temuan didalam memenuhi target.

C. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020 Rp. **109.286.224.268,78**, terdiri atas Belanja Tidak Langsung berjumlah Rp. **7.967.459.396,78** Belanja Langsung berjumlah Rp.**101.318.764.872,00**. Realisasi Anggaran pada Tahun 2020 berjumlah Rp. **98.736.808.412,07** (90,35%).

Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada **sasaran 1: Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman sebesar: 95,93%**, sementara penyerapan anggaran terendah **Sasaran 2: Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah sebesar: 2,77%** Adapun rincian capaian kinerja dan anggaran ditahun 2020 dapat dilihat Tabel 3.20:

Tabel. 3.20
Realisasi Capaian Sasaran/Indikator
Tahun 2020

Sasaran/Indikator	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	100	91.720.635.972,00	83.491.083.827,07	91,03
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	100	944,810,000	636,776,398	67.40
Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100	3,785,270,000	3,631,392,565	95.93
Persentase Luas Lahan Bersertifikat	9,17	159,850,000	74,508,800	46.61
Persentase Konflik Tanah yang diselesaikan	50	219,130,000	6,080,000	2.77
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	100	3,593,637,400	3,170,596,071	88.23
J U M L A H		100.423.333.372,00	91.010.437.661,07	65,33

Ket: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2020 (diolah).



D. Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi melihat sampai sejauh mana capaian sasaran/indikator terhadap realisasi anggaran pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel. 3.20 sebagai berikut:

Tabel. 3.20
Realisasi Capaian Kinerja dan Tingkat Efisiensi Tahun 2020

Sasaran/Indikator		Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Meningkatnya Kualitas PSU Permukiman	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20,65	89.88	10,12
	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	38,45	67.40	32,60
	Persentase Rumah Layak Huni yang Terbangun	100%	95.93	4,07
Meningkatnya Kepemilikan Tanah Pemerintah	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	4,91	46.61	53,39
	Persentase Konflik Pertanahan yang diselesaikan	0	2.77	97,23
Meningkatnya Capaian Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Prediket Akuntabilitas Kinerja	B	B	B

Ket: Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis T.A 2020 (diolah).





PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah dicapai. yaitu **3 (Tiga) sasaran** dan **6 (Enam) indikator Kinerja** kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Hanya ada indikator yang tidak optimal didalam pencapaian sasaran, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis Namun demikian, untuk tahun 2020, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis fokus terhadap urusan pelayanan wajib yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur Perumahan khususnya penyediaan Rumah Layak Huni yang merupakan amanah undang-undang dan penyediaan Prasarana Utilitas Umum bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
2. Penataan kawasan permukiman kumuh menjadi fokus utama, hal tersebut dikarenakan pentingnya lingkungan hidup yang sehat, berkesinambungan serta layak bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis.
3. Pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, kedepan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bengkalis berkomitmen didalam pendataan asset-asset Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Komitmen Dinas Perumahan, Permukiman Kabupaten Bengkalis terhadap pencapaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh pihak terkait yang dalam hal ini inspektorat merupakan komitmen terhadap transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.